

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi nasional tercermin dari pembangunan ekonomi dalam lingkup terkecilnya, yaitu ekonomi desa. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menumbuhkan perekonomian. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk pendanaan. Menurut Karuniawan dkk (2017) lembaga keuangan yang saat ini ada di masyarakat antara lain bank sentral, bank umum, perusahaan asuransi, pegadaian, dana pensiun, koperasi simpan pinjam, dan lembaga keuangan lainnya. Khususnya bagi masyarakat pedesaan di Provinsi Bali, telah dibentuk lembaga keuangan untuk meningkatkan perekonomian desa.

Berdasarkan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, 2017 nomor 3 menyebutkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga yang dibentuk, dikelola dan dimiliki oleh Desa Pakraman, dan hanya melayani kebutuhan masyarakat desa, warga Desa Pakraman dengan tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat di desa melalui tabungan yang tepat sasaran, distribusi kredit. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Bali menetapkan Keputusan Gubernur Nomor: 972 Tahun 1984 tanggal 1 November 1984 tentang Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Suari dkk, 2019). LPD dibentuk dimaksudkan untuk dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan dan dalam memecahkan masalah kelangkaan modal dan mobilitas dana masyarakat untuk dikembangkan dalam

rangka meningkatkan usaha kelompok ekonomi lemah yang banyak terdapat di pedesaan.

Kecamatan Gianyar sebagai salah satu kecamatan di Provinsi Bali merupakan daerah yang mengatur perekonomian masyarakatnya. Hal ini terlihat dari banyaknya LPD yang tersebar di kecamatan tersebut. Secara umum LPD di Kecamatan Gianyar telah mampu membantu mendorong perekonomian desa tersebut. Namun di sisi lain, tidak semua LPD di Kecamatan Gianyar mengalami kondisi yang diinginkan. Ada beberapa LPD yang sudah tidak aktif atau tidak beroperasi lagi. Salah satu penyebab turunnya level LPD adalah rendahnya kualitas pelaporan keuangan yang dimiliki (Devi, 2016).

Hal yang sama terjadi pada LPD Desa Adat Belusung, Pejeng, Gianyar. Mantan staf LPD pada bagian tabungan divonis hukuman 4 tahun penjara karena terbukti menyelewengkan uang LPD sebesar Rp 1,8 miliar. Selain dijatuhi hukuman penjara, mantan staf LPD tersebut juga dihukum pidana denda Rp 200 juta subsider tiga bulan dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1,8 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayar diganti dua tahun penjara. Dalam berkas terpisah ada staf *accounting* yang ikut terseret dalam kasus ini yang menerima hasil rekapitulasi harian transaksi setoran maupun penarikan tabungan dari petugas tabungan untuk dimasukkan ke dalam sistem LPD. Staf *accounting* ini juga melayani nasabah yang datang langsung ke LPD dan kemudian diserahkan ke kasir. Namun, sejak tahun 2018 hingga 2020, petugas ini tidak mencatatkan dan tidak menginput sesuai jumlah setoran. Selisihnya diambil untuk kepentingan pribadi. Hal ini membuat laporan keuangan yang disajikan tidak *reliable*. Adanya manipulasi data pada laporan keuangan menyebabkan terjadinya selisih antara

saldo kas tercatat dengan saldo kas yang sebenarnya. Dengan adanya kasus tersebut LPD Desa Adat Belusung tidak dapat beroperasi dengan baik serta mengalami kerugian total sebesar Rp. 2.6 miliar lebih (nusabali.com, 2022).

Kasus tersebut membuktikan bahwa sangat penting bagi LPD menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut SAK ETAP kualitas pelaporan keuangan ditentukan oleh beberapa faktor yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami, materialitas dan konservatisme, keseimbangan antara biaya dan manfaat, serta adapun beberapa faktor yang dapat mendukung dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, yaitu tingkat pemahaman akuntansi, kualitas sistem informasi akuntansi, tingkat pendidikan, profesionalisme, fungsi badan pengawas (Pratiwi, 2021).

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah tingkat pemahaman akuntansi. Menurut Sinaranata, dkk, (2019) pemahaman akuntansi adalah salah satu kunci dalam penyediaan dan pemanfaatan laporan keuangan. Tingkat pemahaman akuntansi ini dapat diukur dari pemahaman seseorang terhadap proses mencatat transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan. Pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mensahkan SAK ETAP dan standar ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2011. Entitas yang dapat menggunakan standar ini yakni entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, seperti pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha dan lembaga pemeringkat kredit (Karuniawan dkk, 2017). Laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di

Bali penyusunannya dilakukan berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk perusahaan kecil dan menengah. LPD sebagai Lembaga komunitas milik desa adat lebih memilih untuk menerapkan SAK ETAP dikarenakan isi didalam standar akuntansi ini lebih ringkas serta poin-poin yang dijabarkan lebih ringan, lebih jelas dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti (Prabhawati, 2018). Pemahaman akuntansi merupakan faktor penting dalam pelaporan keuangan sebab seringkali karena rendahnya pengetahuan akuntansi yang dimiliki manajemen membuat LPD mengalami kegagalan (Hendrayani dk, 2021). Menurut Nudilah & Janatum (2016) dengan adanya kecerdasan atau pengetahuan tentang akuntansi yang baik maka, kualitas laporan keuangan perusahaan akan lebih bagus dan terhindar dari adanya kesalahan-kesalahan informasi yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pemahaman akuntansi itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2019), Krisnawati (2019), Suari dkk (2019), Pramesti dkk (2021), Wati dkk (2021), menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Lohanda (2017), Pebriantari dkk (2021), menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah kualitas sistem informasi akuntansi. Menurut Susanto (2017:13), kualitas sistem informasi akuntansi merupakan efektifitas yang berkaitan dengan relevansi suatu informasi dalam mendukung sistem informasi akuntansi yang termasuk didalamnya harus disajikan dalam waktu yang tepat, akurat, konsisten dapat digunakan, dan

lengkap. Jika kualitas sistem informasi akuntansi semakin baik, maka akan semakin baik pula kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan, sebaliknya semakin rendah kualitas sistem informasi akuntansi, maka semakin rendah juga kualitas pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Suari dkk (2019), Wati dkk (2021), menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2019) menyatakan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah tingkat pendidikan. Menurut Depdiknas (2003) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tingkat pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan dapat menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Lohanda (2017), Sukriani dkk (2018), Pramesti dkk (2021), menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Devi dkk (2016), menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah profesionalisme. Menurut Iskandar & Indrato (2014), profesionalisme merupakan sikap dan perilaku seorang dalam melaksanakan profesinya. Sikap profesionalisme sangat diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas karena dengan profesionalisme berarti seorang pembuat laporan keuangan telah menggunakan kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya secara maksimal sehingga laporan keuangan yang dibuat memiliki kualitas yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Basar (2017), Sari (2021) menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati (2019), menyatakan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Faktor kelima yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah fungsi badan pengawas. Menurut Pemerintah Daerah Provinsi Bali (2017) Peraturan Gubernur No. 44 tahun 2017, tentang pengurus dan pengawas LPD pasal 45, menyatakan bahwa yang bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan LPD adalah badan pengawas LPD. Fungsi badan pengawas adalah melakukan sebuah aktivitas konsultasi dan memastikan tercapainya tujuan yang di rancang untuk menambah dan meningkatkan operasi organisasi. Badan pengawas membantu organisasi memenuhi tujuan melalui pelaksanaan evaluasi dengan pendekatan disiplin dan sistematis untuk meningkatkan efektifitas manajemen, pengendalian, dan proses tata kelola resiko. Keefektifan badan pengawas diperlukan untuk perencanaan dan pelaporan yang nanti hasilnya akan dievaluasi oleh komite audit. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2019), Suari dkk (2019), Pebriantari dkk (2021) menunjukkan bahwa fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap

kualitas pelaporan keuangan, sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati (2019), Pramesti dkk (2021), menyatakan bahwa fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan terdapat ketidak konsistenan hasil dari penelitian terdahulu (*research gap*) dan fenomena kualitas pelaporan keuangan yang dilihat dari kondisi LPD yang mana dalam pengembangannya belum sesuai dengan harapan, sehingga akan berdampak pada kualitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian kembali dengan tujuan memberikan penjelasan yang lebih beragam. Berdasarkan hasil fenomena dan penelitian sebelumnya maka penelitian kembali akan dilakukan dengan menguji pengaruh tingkat pemahaman akuntansi, kualitas sistem informasi akuntansi, tingkat pendidikan, profesionalisme, dan fungsi badan pengawas terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Gianyar.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Gianyar?
2. Apakah kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Gianyar?

3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Gianyar?
4. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Gianyar?
5. Apakah fungsi badan pengawas berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas maka tujuan dalam penelitian adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Gianyar.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Gianyar.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Gianyar.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh profesionalisme terhadap kualitas pelaporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Gianyar.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh fungsi badan pengawas terhadap kualitas pelaporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Gianyar.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa di dalam mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan khususnya bidang akuntansi, salah satunya mengenai pengaruh tingkat pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi, tingkat pendidikan, profesionalisme, dan fungsi badan pengawas terhadap kualitas pelaporan keuangan pada LPD di Kecamatan Gianyar. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih jauh lagi di penelitian selanjutnya.

2. Bagi Fakultas dan Universitas

Hasil penelitian ini dapat mejadi bahan evaluasi tambahan dan dapat melengkapi kebutuhan perpustakaan yang nantinya dapat dipakai sebagai referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan atau solusi untuk pemecahan masalah bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan laporan keuangan khususnya pihak manajemen LPD sebagai pertimbangan untuk langkah selanjutnya agar lebih professional dalam hal kualitas pelaporan keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Putri (2017:23) teori keagenan yaitu menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang lebih memahami menjalankan bisnis sehari-hari. Semakin besar perusahaan maka akan terjadi pemisahan antara pemilik dan pengendali perusahaan. Pemegang saham bertindak sebagai pemilik dan manajemen atau agen merupakan pengendali perusahaan. Pemisahan peran ini terjadi karena pemegang saham tidak dapat lagi mengikuti kegiatan perusahaan setiap hari. Banyak pemegang saham yang bertindak pasif artinya tidak ikut serta dalam kegiatan operasional perusahaan, oleh karena itu manajer diharapkan dapat bertindak demi kepentingan saham. Menurut Sambera & Meiranto (2013), masing-masing pihak dalam hubungan keagenan mempunyai kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham menginginkan keuntungan atas investasi yang ditanamkan pada perusahaan, sedangkan manajemen menginginkan kompensasi atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

Monitoring yang dilakukan oleh pihak independen memerlukan biaya pengawasan (*monitoring cost*) berupa biaya audit, yang merupakan salah satu dari *agency cost* (Jensen, dan Meckling, 1976). Biaya pengawasan (*monitoring cost*) biaya untuk mengawasi perilaku agen apakah agen telah bertindak sesuai kepentingan principal dengan melaporkan secara akurat semua aktivitas yang

telah ditugaskan kepada manajer. Auditor merupakan pihak yang dianggap dapat menjembatani kepentingan pihak pemegang saham (principal) dengan pihak manajemen (agen) dalam mengelola keuangan perusahaan.

Begitu pula pada LPD, pihak manajemen (pengurus) LPD membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus atas kinerja LPD dalam satu periode akuntansi. Berdasarkan pada teori keagenan, informasi yang tercantum dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengurus LPD selaku pihak agen berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada anggota LPD, yaitu desa pekraman selaku prinsipal bahwa LPD dapat mengelola dana yang ditanamkan dengan baik. Laporan keuangan juga sebagai sumber informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan LPD. Kualitas laporan keuangan menjadi hal yang diutamakan dalam rangka menjaga kepercayaan pihak prinsipal.

2.1.2 Lembaga Perkreditan Desa

Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menetapkan Raperda tentang Lembaga Perkreditan Desa menjadi perda berdasarkan keputusan DPRD provinsi Bali No 12 Tahun 2017 disana disebutkan sebagai lembaga perekonomian milik desa pekraman, LPD dikelola dan diarahkan untuk berkontribusi bagi pembangunan desa pekraman dan dijelaskan pula bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu wadah kekayaan desa menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha kearah peningkatan taraf hidup karna desa. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali berkembang sejak tahun 1985 yang dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan Desa atas dasar pertimbangan bahwa:

1. Desa pekraman merupakan lembaga tradisional yang lebih mengakar dan dihormati oleh masyarakat pedesaan terutama karena pekramannya (warga desa pekraman).
2. Desa pekraman mempunyai aturan-aturan yang telah disepakati dan dipatuhi baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
3. Desa pekraman merupakan suatu lembaga tradisional dan bersifat kelompok yang didasarkan kepada geografis pekraman.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Bali No 3 Tahun 2017 tercantum fungsi dan tujuan LPD, antara lain:

1. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta menyalurkan modal yang efektif.
2. Memberantas gadai gelap dan sejenisnya.
3. Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan.
4. Meningkatkan daya beli dan kelancaran lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.

Keputusan peralihan Undang-undang Perbankan No 7 Pasal 58 Tahun 1992 menyebutkan bahwa Bank Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Putih Negeri (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Desa (BKD), Bank Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produk Desa (BKPD), dan lembaga-lembaga lain yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) setelah memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Pengelolaan LPD dilakukan oleh

pengurus yang bertanggung jawab kepada karna desa dan di dalam melaksanakan dan mengelola LPD pengurus dapat mengangkat karyawan dalam membantu kegiatan operasional lembaga. Pasal 7 Peraturan Provinsi Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh LPD sebagai berikut:

1. Menerima atau menghimpun dana dari karna desa dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Memberi pinjaman kepada karna desa dan desa.
3. LPD dapat memberikan pinjaman kepada karna desa lain dengan syarat ada kerjasama antara desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
4. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atas bantuan dana.
5. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

LPD dalam kegiatan usahanya menerima dan menyalurkan dana pada masyarakat desa adat serta kegiatan jasa keuangan yang sejenis. Dapat disimpulkan bahwa LPD merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang identic dengan jasa bank yaitu sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat. LPD sebagai lembaga keuangan desa dalam kegiatan operasionalnya dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan LPD dilakukan oleh badan pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh karna desa melalui peruman dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota, sebagai kepala daerah. LPD menggunakan dasar pengakuan *accrual basis* yang merujuk SAK ETAP.

2.1.3 Kualitas Pelaporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan (*financial statment*) adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:5) yang tertuang dalam PSAK No.1, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, SAK ETAP adalah sebuah standar untuk entitas tanpa akuntabilitas publik dalam menyediakan laporan keuangan yang tetap relevan dan andal.

1. Karakteristik SAK ETAP

Ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai disebut dengan sifat atau karakteristik kualitatif. Sifat kualitatif SAK ETAP tersebut diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. ETAP merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.
- b. Menggunakan acuan IFRS untuk *Small Medium Enterprises*.
- c. Lebih sederhana antara lain aset tetap, tidak berwujud menggunakan harga perolehan, entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode ekuitas, mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan.
- d. Kualitatif informasi dalam laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk pertimbangan

sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat.

- e. SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan dalam pos-pos neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan *“matching concept”*.
- f. Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban, atau penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh SAK ETAP.

2. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Berdasarkan SAK ETAP, laporan keuangan lengkap meliputi:

- a. Neraca.
- b. Laporan laba rugi.
- c. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan seluruh perubahan dalam ekuitas, atau perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
- d. Laporan arus kas.
- e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelas lainnya. Laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait (IAI, 2013:12-13).

3. Manfaat Implementasi SAK ETAP

Manfaat mengimplementasikan SAK ETAP di dalam laporan keuangan berikut beberapa manfaatnya, antara lain:

- a. Dapat menyusun laporan keuangan sendiri.
- b. Menyusun laporan keuangan lebih sederhana dibandingkan PSAK IFRS sehingga memberi kemudahan dalam implementasinya.
- c. Laporan keuangan dapat menjadi dasar opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangan untuk memperoleh dana tambahan untuk pengembangan usaha, seperti pinjaman dari kreditur (bank).
- d. Memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan perusahaan dan berbagai ukuran lain bagi kepentingan pengambilan keputusan manajerial lainnya.

2.1.4 Tingkat Pemahaman Akuntansi

Menurut Sinaranata, dkk, (2019) pemahaman akuntansi adalah salah satu kunci dalam penyediaan dan pemanfaatan laporan keuangan. Tingkat pemahaman akuntansi juga merupakan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan maupun sebagai proses atau praktiknya untuk lebih memahami akuntansi secara komprehensi, mengetahui sistem dan prosedur akuntansi, standar akuntansi yang berlaku, kebijakan akuntansi serta memahami komponen-komponen laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan Priyatno (2009).

Laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali penyusunannya dilakukan berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk perusahaan kecil dan menengah. LPD sebagai Lembaga komunitas milik desa adat lebih memilih untuk menerapkan SAK ETAP dikarenakan isi didalam standar akuntansi ini lebih ringkas jika dibandingkan

dengan standar akuntansi yang berlaku umum PSAK. Perusahaan ataupun badan yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya untuk konsumsi publik akan lebih terbantu dengan adanya SAK ETAP, yang poin-poinnya dijabarkan lebih ringan, lebih jelas dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti (Prabhawati, 2018).

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel implementasi SAK ETAP merujuk pada siklus laporan keuangan yang dikemukakan oleh Priyatno (2009), dan pedoman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2009). Berdasarkan siklus laporan keuangan SAK ETAP yang dikemukakan oleh Priyatno (2009) serta pedoman penyusunan laporan keuangan SAK ETAP yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2009), kemudian diringkas dan dikembangkan hingga dihasilkan indikator yang dapat mewakili dan mampu mengukur atau menggambarkan variabel implementasi SAK ETAP, sehingga indikator dari implementasi SAK ETAP adalah sebagai berikut:

1) Siklus Laporan Keuangan SAK ETAP.

Siklus laporan keuangan SAK ETAP mengacu pada siklus laporan keuangan yang dikemukakan oleh Priyatno (2009) yang kemudian dikembangkan, sehingga diperoleh indikator yang dapat mengukur siklus laporan SAK ETAP, antara lain:

- a) Mengidentifikasi bukti transaksi penerimaan kas.
- b) Mengidentifikasi bukti transaksi pengeluaran kas.
- c) Mencatat (menjurnal) transaksi ke dalam buku jurnal.
- d) Memposting jurnal ke buku besar.

- e) Membuat neraca saldo.
 - f) Membuat jurnal penyesuaian.
 - g) Menyusun neraca lajur.
 - h) Membuat jurnal penutup dan pembalik.
- 2) Laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman SAK ETAP.

Laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2009) yang kemudian diringkaskan yang sudah mewakili laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, antara lain:

- a) Persediaan.

Entitas harus mengungkapkan nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual.

- b) Kelengkapan laporan keuangan.

Laporan keuangan SAK ETAP terdiri dari:

- a. Neraca.
- b. Laporan laba/rugi.
- c. Laporan perubahan modal atau ekuitas.
- d. Laporan arus kas.
- e. Laporan catatan atas laporan keuangan (CALK).

- 3) Frekuensi laporan keuangan.

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan, termasuk informasi *komparatif* minimum satu tahun sekali.

4) Kepatuhan terhadap SAK ETAP.

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan *eksplisit* dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

Konsep dasar pemahaman akuntansi terdiri dari tiga bagian yaitu aktiva, hutang, dan modal sebagai berikut:

- 1) Aktiva dalam pengertiannya merupakan aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak berwujud lainnya misalnya hak paten, hak menerbitkan dan sebagainya.
- 2) Hutang merupakan semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur.
- 3) Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), dan laba ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.

Jika seseorang akuntan tidak memiliki pemahaman dalam akuntansi maka akan sulit untuk mengerti dan mengambil keputusan dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya pemahaman akuntansi, maka pengambilan keputusan laporan keuangan akan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan tingkat kemampuan

komponen laporan keuangan dan prinsip akuntansi serta tingkat pemahaman terhadap pengakuan untuk unsur-unsur dalam laporan keuangan (Lohanda, 2017).

2.1.5 Kualitas Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Krismiaji (2015:4-5), sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Menurut Davis dalam Yamit (2005:8), kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas juga merupakan standar yang digunakan dalam konteks kemampuan, kinerja, keandalan, dan kemudahan pemeliharaan yang dapat memenuhi atau melebihi harapan.

Menurut Susanto (2013:14) kualitas sistem informasi akuntansi adalah karakteristik kualitas yang dari suatu sistem informasi sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan efisien. Kualitas sistem informasi akuntansi terdiri dari komponen sistem informasi akuntansi yaitu *hardware*, *software*, *brainware*, *telecommunication network*, dan *data base* yang berkualitas serta *quality of work* dan *satisfaction of users*. Sistem informasi yang berkualitas apabila bersifat fleksibel, efisien, mudah diakses, dan tepat waktu. Menurut SAK ETAP terdapat beberapa karakteristik kualitatif sebagai syarat informasi laporan keuangan yang bermanfaat:

- 1) Dapat dipahami. Laporan keuangan yang mudah dipahami hendaknya informasi yang ditampung memberi kemudahan untuk segera dapat dipahami para pemakai.

- 2) Relevan. Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.
- 3) Materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
- 4) Keandalan. Informasi harus andal, secara rinci, informasi yang dapat diandalkan harus mengandung pengertian sebagai berikut:
 - a. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan.
 - b. Menggambarkan masalah pokok ekonomi dari suatu kejadian.
 - c. Bebas dari keberpihakan.
 - d. Mencerminkan kehati-hatian.
 - e. Mencakup semua hal yang material.
- 5) Substansi mengungguli bentuk. Dimana terdapat transaksi atau peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan bentuk hukum.
- 6) Pertimbangan sehat. Dalam hal ini mengandung unsur kehati-hatian saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga asset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Penyusunan laporan keuangan harus menggunakan pertimbangan yang sehat.
- 7) Kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan material biaya.

- 8) Dapat diperbandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecendrungan posisi dan kinerja keuangan serta untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan secara *relative* atau membandingkan laporan keuangan periode yang lampau.
- 9) Tepat waktu. Pada hal ini diperlukannya penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan.
- 10) Keseimbangan biaya dan manfaat. Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya.

2.1.6 Tingkat Pendidikan

Menurut Helmawati (2014:172) tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan juga berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam kehidupan masyarakat. Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat penting bagi kesiapan bangsa dalam menghadapi tantangan global dimasa depan. Dimana tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup Indonesia (Rohman, 2013:223).

Pendidikan terdiri dari dua yaitu pendidikan formal dan non-formal. Menurut Triwiyanto, (2014:120) pendidikan formal adalah jalur pendidikan

terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal berkaitan erat dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan manusia mulai perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan iman (Devi, dkk 2016). Menurut (Marzuki (2012:137) pendidikan nonformal adalah proses belajar terjadi secara terorganisasi diluar sistem persekolahan atau pendidikan formal, baik dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih besar yang dimaksudkan untuk melayani sasaran didik tertentu. Pendidikan nonformal merupakan sebuah layanan pendidikan yang tidak dibatasi oleh waktu, usia, jenis kelamin, ras, suku (keturunan), kondisi sosial budaya, ekonomi dan lain-lain. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal yang ada disekolah (Rahmawati, 2014).

Pengetahuan dan pemahaman pegawai akan pelaksanaan kerja sangat menentukan dalam usaha mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Pendidikan formal yang memadai pegawai bagian keuangan akan lebih mudah mengerti dan memahami pekerjaan yang dilakukan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pegawai dan dengan latar belakang pendidikan akuntansi akan sangat membantu dalam membuat laporan keuangan (Wardani, 2014). Orang yang berpendidikan akan lebih rasional dalam berfikir dan bertindak serta memahami tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik. Tingkat pendidikan yang memadai merupakan hal yang penting dalam peningkatan kualitas profesionalisme suatu karyawan. Seorang karyawan yang memiliki tingkat

pendidikan yang sesuai akan lebih mudah dalam memahami suatu prosedur maupun kebijakan yang akan menunjang karyawan tersebut untuk terus bersikap profesional dalam bekerja.

2.1.7 Profesionalisme

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang memiliki arti suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan, mencakup ilmu pengetahuan, keterampilan dan metode. Profesional mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyangkut suatu profesi. Profesionalisme berarti suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan dan latihan khusus, daya pemikiran yang kreatif untuk melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya (Sari, dkk 2021). Maka, dapat disimpulkan bahwa, profesionalisme adalah suatu sikap dalam melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu sesuai dengan profesi yang digeluti dan selalu berpedoman pada etika.

Menurut Pratiwi (2021) profesionalisme mengacu pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang memberi karakteristik suatu profesi. Seorang yang profesional cenderung dipercaya dan dapat diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini tentu membuat pekerjaan yang dilaksanakan akan berjalan dengan lancar, sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Begitupun dengan seorang *accounting*. *Accounting* yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. *Accounting* yang menjalankan tugas profesi dengan sungguh-sungguh maka kinerjanya akan optimal.

2.1.8 Fungsi Badan Pengawas

Menurut Wedayani & Jati, 2012 peran badan pengawas internal secara aktif mengawasi kebijakan operasional, praktik akuntansi, pelaporan keuangan dan menjadi penghubung antara pengelolaan dengan auditor eksternal. Peranan badan pengawas internal sangat strategis, disamping sebagai auditor internal juga sebagai partner yang bersinergi untuk memajukan LPD. Peran badan pengawas intern dalam mengawasi operasional LPD bisa dilakukan oleh siapa saja didesa pekraman bersangkutan tanpa mengenal jenjang dan jenis pendidikan. Semakin besar asset LPD maka ruang lingkup pengawasan menjadi semakin luas dan kompleks. Mengingat pentingnya peranan badan pengawas intern, maka ia harus memiliki kejelasan dalam struktur organisai yang ada, keahlian teknis, dan pola pikir yang membuat mampu menjalankan tata kelola, bimbingan, dan tanggung jawab.

Sesuai dengan pasal 1 ayat (11) Perda No. 3 tahun 2007, yang dimaksud pengawasan internal adalah badan pengawas yang dibentuk oleh desa dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD. Divisi audit pada LPD adalah badan pengawas internal yang sering disebut dengan Badan Pengawas Desa secara kelembagaan harus memahami seluruh elemen pengendalian yang terdiri dari eveluasi pengelolaan resiko, evaluasi pengendalian, dan evaluasi proses *governance*, yang terdiri dari:

1) Evaluasi Pengelolaan Risiko

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.

2) Evaluasi Pengendalian

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisien dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.

3) Evaluasi Proses *Governance*

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam mencapai tujuan. Dan selain itu audit intern harus mengevaluasi rancangan, implementasi, dan efektivitas dari kegiatan, program dan sasaran organisasi yang berhubungan dengan etika.

Menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 491 Tahun 1998 mengenai Pembentukan dan Kependudukan Badan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a) Ditiap-tiap LPD dibentuk badan pengawas LPD.
- b) Badan pengawas terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota.
- c) Bendesa adat sebagai ketua badan pengawas.
- d) Ketua dan anggota badan pengawas tidak dibenarkan merangkap sebagai badan pengurus LPD.

Tugas dari Badan Pengawas LPD adalah:

- a) Mensosialisasikan keberadaan LPD.
- b) Memotivasi dan meningkatkan kinerja LPD.
- c) Mengawasi proses penyaluran kredit dan penanganan kredit macet atau bermasalah.

d) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara periode atau terjadwal serta identitas dengan program kerja Badan Pengawas.

Seorang pengawas LPD memiliki beberapa tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab ini dibagi kedalam 4 (empat) fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi Perencanaan

Dalam fungsi perencanaan pengawas harus terlibat dalam menetapkan rencana operasi yang terintegrasi, baik jangka pendek maupun panjang, serta menganalisis dan mengkomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat dalam manajemen LPD. Salah satunya yang disebut dengan program kerja.

2) Fungsi Pengendalian

Dalam fungsi pengendalian pengawas harus mengembangkan dan menetapkan norma-norma sebagai ukuran pelaksanaan dan menjadikan pedoman kepada manajemen dalam menjamin adanya penyesuaian hasil pelaksanaan dengan rencana yang ditetapkan, yang selanjutnya perlu diadakan analisis perbandingan antara pedoman dengan realisasi secara menyeluruh.

3) Fungsi Pelaporan

Dalam fungsi pelaporan pengawas perlu menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan hasil-hasil yang dicapai oleh manajemen untuk selanjutnya dilaporkan dalam rapat rutin yang dilakukan secara periodik dan terprogram. Pengawas dan manajemen dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan dan secara bersama pula dapat memikirkan jalan keluar yang harus dilakukan apabila ditemukan kendala operasional di lapangan.

4) Fungsi Akuntansi

Dalam fungsi akuntansi pengawas ikut melaksanakan, menetapkan dan memelihara sistem akuntansi pada semua jenjang dan usaha LPD agar terjamin kewajaran semua transaksi keuangan sesuai dengan syarat pengendalian intern yang baik. Fungsi ini meyakinkan pengawas bahwa semua transaksi yang terjadi di LPD telah dicatat tepat waktu, telah diotorisasi oleh orang berwenang dan dilaksanakan oleh orang yang tepat.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti yang meneliti tentang tingkat pemahaman akuntansi, kualitas sistem informasi akuntansi, tingkat pendidikan, profesionalisme, fungsi badan pengawas. Berbagai penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan penambahan variabel maupun dengan mengurangi variabelnya, berikut merupakan beberapa jenis penelitian sebelumnya:

Yang pertama jurnal acuan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Devi dkk (2016) yang meneliti tentang pengaruh pendidikan, motivasi kerja, dan kematangan usia terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Empiris pada Koperasi Pegawai Negeri di Kota Singaraja). Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah 22 (Koperasi) di kota Singaraja dengan sampel sebanyak 44 orang dan menggunakan uji asumsi klasik dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linear berganda. Variabel independen pada penelitian adalah pendidikan, motivasi kerja, dan kematangan usia sedangkan variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Hasil analisis pada penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tidak

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan motivasi kerja, kematangan usia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan dalam penelitian terdapat pada variabel independennya pendidikan dan variabel dependen yang digunakan kualitas laporan keuangan, sedangkan perbedaan pada penelitian terdapat pada variabel independennya motivasi kerja, dan kematangan usia serta pada lokasi penelitian yang dipilih pada Koperasi Pegawai Negeri di Kota Singaraja.

Penelitian yang dilakukan oleh Basar (2017) yang meneliti tentang pengaruh profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh aparat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gowa dengan banyak sampel 20 orang. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat, sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menyatakan bahwa profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan dalam penelitian yaitu adanya kesamaan pada variabel independennya yaitu profesionalisme dan sama-sama menggunakan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan, sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian yaitu pada variabel independen yang digunakan pengetahuan aparat inspektorat dan lokasi penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Penelitian yang dilakukan oleh Lohanda (2017) yang meneliti tentang pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, dan pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP. Lokasi penelitian yaitu pada UMKM kerajinan batik Kecamatan Kraton Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu sebanyak 36 UMKM. Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu teknik analisis regresi linier berganda dengan pengambilan metode *purposive sampling*. Variabel independen yang digunakan pada penelitian adalah tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, dan pelatihan penyusunan laporan keuangan, sementara variabel dependen yang digunakan pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP. Hasil yang diperoleh pada penelitian menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan UMKM, sedangkan pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan UMKM. Adapun persamaan yang terdapat pada penelitian yaitu adanya kesamaan variabel independennya tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi, sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel independennya pelatihan penyusunan laporan keuangan, variabel dependennya pelaporan keuangan UMKN dan juga terletak pada lokasi penelitian yaitu UMKM kerajinan batik Kecamatan Kraton Yogyakarta.

Sukriani dkk (2018), yang meneliti mengenai pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDES di Kecamatan Negara. Penelitian dilaksanakan pada LPD yang ada di Kecamatan Negara. Peneliti mengambil sampel sebanyak 37 orang, serta dengan populasi seluruh bumdes yang ada di

Kecamatan Negara, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda dengan pengambilan metode *purposive sampling*. Variabel independen yang digunakan pada penelitian adalah tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi sedangkan sebagai variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Hasil yang diperoleh pada penelitian menyatakan bahwa tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Adapun persamaan yang terdapat pada penelitian yaitu terdapat pada variabel independen tingkat pendidikan dan variabel dependennya kualitas laporan keuangan, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada variabel independennya pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi, perbedaannya juga terdapat pada lokasi penelitiannya BUMDES di Kecamatan Negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2019) yang meneliti tentang pengaruh tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas internal, kualitas sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan LPD di Kota Denpasar. Tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas internal, kualitas sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia merupakan variabel independen dalam penelitian, sedangkan kualitas laporan keuangan merupakan variabel dependennya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis regresi linier berganda. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh karyawan yang bekerja pada LPD di Kota Denpasar yang berjumlah 105 orang. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas

internal, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan kualitas sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu adanya kesamaan pada variabel independen tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas internal, kualitas sistem informasi akuntansi, serta adanya kesamaan pada variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas laporan keuangan, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan kualitas sumber daya manusia serta lokasi penelitian yang dilakukan pada LPD di Kota Denpasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati (2019) meneliti tentang pengaruh etika kepemimpinan, profesionalisme, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu etika kepemimpinan, profesionalisme, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi, sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas laporan keuangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis regresi linier berganda. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian adalah 122 LPD di 6 Kecamatan di Badung dengan menggunakan sebanyak 110 sampel. Hasil penelitian menyatakan bahwa etika kepemimpinan dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan profesionalisme dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Terdapat persamaan dalam penelitian yaitu pada variabel independennya profesionalisme, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi serta pada variabel

dependen yang digunakan yaitu kualitas laporan yang digunakan, sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian yaitu terdapat pada variabel independennya etika kepemimpinan, dan pada lokasi tempat penelitiannya Lembaga Perkeriditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung.

Suari dkk (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh etika kepemimpinan, kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar. Etika kepemimpinan, kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian serta kualitas pelaporan keuangan merupakan variabel dependennya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian 270 LPD dengan 172 LPD sebagai sampelnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Adapun persamaan dalam penelitian terdapat pada variabel independen yang digunakan yaitu kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas dan tingkat pemahaman akuntansi serta pada variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas pelaporan keuangan, sementara itu perbedaannya terdapat pada variabel independen yang digunakan yaitu etika kepemimpinan dan lokasi yang digunakan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar.

Pramesti dkk (2021) yang meneliti tentang pengaruh etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, pendidikan, pengalaman kerja dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan di LPD Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh LPD yang ada di Kabupaten Mengwi yaitu 37 LPD. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, pendidikan, pengalaman kerja dan tingkat pemahaman akuntansi, sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menyatakan bahwa etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pendidikan, pengalaman kerja, dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan dalam penelitian yaitu adanya kesamaan pada variabel independennya yaitu fungsi badan pegawai, pendidikan, dan tingkat pemahaman akuntansi serta variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas laporan keuangan, sedangkan perbedaan dalam penelitian yaitu terletak pada variabel independennya yaitu etika kepemimpinan, dan pengalaman kerja serta lokasi penelitiannya di LPD Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Wati dkk (2021) yang meneliti mengenai pengaruh etika kepemimpinan, audit internal, kualitas sistem informasi akuntansi, dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Penelitian menggunakan populasi sebanyak 35 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berada di Kota Denpasar. Teknik Pengambilan sampel yang digunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik

penentuan sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel Sugiyono (2017: 118). Sehingga sampel yang digunakan pada penelitian berjumlah 70 responden yaitu pimpinan dan akuntansi di masing-masing LPD yang berperan sebagai pembuat laporan keuangan, dengan menggunakan teknik analisis data yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian etika kepemimpinan, audit internal, kualitas sistem informasi akuntansi, dan tingkat pemahaman akuntansi, sedangkan variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian dalam analisis menyatakan bahwa etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan audit internal, kualitas sistem informasi akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Persamaan pada penelitian yaitu adanya kesamaan pada variabel independen yang digunakan yaitu kualitas sistem informasi akuntansi dan tingkat pemahaman akuntansi, serta variabel dependen yang digunakan kualitas laporan keuangan, sedangkan perbedaannya adanya ketidak samaan antara variabel independen yang digunakan seperti etika kepemimpinan, audit internal dan adanya perbedaan pada lokasi penelitian LPD di Kota Denpasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Pebriantari dkk (2021) yang meneliti tentang pengaruh tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Empiris Pada LPD SeKecamatan Gianyar). Populasi yang digunakan adalah pimpinan LPD, ketua badan pengawas, dan kepala staf akuntansi dengan sampel yang dipakai sebanyak 102 responden, dengan menggunakan teknik analisis data yaitu teknik analisis regresi linier berganda dengan pengambilan metode

purposive sampling. Pada penelitian tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas dan pemanfaatan teknologi informasi disebut sebagai variabel independen sedangkan kualitas pelaporan keuangan merupakan variabel dependennya. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sementara itu fungsi badan pengawas dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan dalam penelitian terdapat pada variabel independennya yaitu tingkat pemahaman akuntansi, fungsi badan pengawas, serta adanya kesamaan pada variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas pelaporan keuangan dan lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian LPD SeKecamatan Gianyar, sedangkan perbedaan terdapat pada variabel independen yang digunakan yaitu pemanfaatan teknologi informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) yang meneliti tentang pengaruh profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Sawan. Seluruh karyawan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Sawan menjadi populasi dalam penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan yakni *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive* sampling. Pengurus BUM Desa (ketua, sekretaris dan bendahara) adalah kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian, sehingga jumlah responden sebanyak 39 orang, dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linear berganda. Profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman kerja pada penelitian merupakan variabel independen, sedangkan kualitas laporan keuangan pada penelitian merupakan variabel dependennya. Hasil dari penelitian dinyatakan bahwa profesionalisme, kompetensi,

dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan pada penelitian yaitu pada variabel independen yang digunakan profesionalisme dan variabel dependen yang digunakan kualitas laporan keuangan, sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel independen yaitu kompetensi, dan pengalaman kerja serta pada lokasi penelitian yang digunakan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Sawan.

